

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AGRIBISNIS  
PERDESAAN (PNPM-AP) TERHADAP KINERJA  
KELOMPOK WANITA TANI DAN PENDAPATAN  
ANGGOTA KELOMPOK WANITA TANI  
DI KECAMATAN TOMPOBULU  
KABUPATEN BANTAENG**

**R A H M I**



**PROGRAM PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN PERTANIAN  
PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2011**

## PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Keinginan penulis untuk meneliti tentang PNPM Agribisnis Perdesaan berawal dari keingintahuan yang lebih tentang program tersebut baik mengenai pelaksanaannya maupun manfaatnya bagi masyarakat, mengingat program ini merupakan proyek percontohan dan hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun.

Rampungnya penyusunan tesis ini tidak lepas dari peranan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan penuh ketulusan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Program Pasca Sarjana **Bapak Prof. Dr. Ir. Mursalim**, Ketua Program Studi Sistem-Sistem Pertanian **Bapak Prof. Dr. Ir. Syamsuddin Garantjang, M.Agr**, **Bapak Dr. Ir. Rahim Darma, M.S** selaku Ketua Komisi Penasehat, **Ibu Dr. Ir. Saadah, M.Si.** selaku Anggota Komisi Penasihat. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada **Bapak Prof. Dr. Ir. A. Rahman Mappangaja, M.S**, **Ibu Prof. Dr. Ir. Farida Nurland, M.S**, dan **Bapak Dr. Muhammad Arsyad, S.P., M.Si.** selaku Tim Penguji.

Terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada ayahanda **Mustafa** dan ibunda **Sitti Paisah**, saudaraku **Drs. Muh. Said, Aisyah, drg. Ismail, S.Kg., Rahma, S.Pdi., Rahmat Mustafa, S.Si.Apt.** yang telah memberikan dukungan dan doanya sepanjang waktu.

Pada kesempatan ini pula penulis sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bantaeng **Ir. Meyriyani, M.Si.** dan Kabid PUEM BPM dan Pemdes Bantaeng **Harmoni, S.Sos.M.Si.** yang telah memberikan izinnya, serta ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada seluruh dosen Pascasarjana Program Studi Sistem-Sistem Pertanian Konsentrasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Pertanian dan teman mahasiswa angkatan 2008 yang tidak dapat penulis cantumkan namanya satu persatu.

Makassar, Agustus 2011

**Penulis**

## DAFTAR ISI

PRAKATA .....	iii
ABSTRAK .....	v
ABSTRACK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Gambaran Umum Tentang PNPM Agribisnis Perdesaan .....	10
B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat .....	18
C. Kinerja Kelompok Wanita Tani .....	24
D. Kerangka Pemikiran .....	25
E. Hipotesis .....	32
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....	33
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	33
B. Metode Pengumpulan Data .....	33
C. Jenis dan Sumber Data .....	34

D. Penentuan Populasi dan sampel .....	34
E. Metode Analisis data .....	35
F. Konsep Operasional .....	36
BAB IV. KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	40
A. Letak Georafis dan Keadaan Alam .....	40
B. Keadaan Penduduk .....	40
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Identitas Responden .....	45
B. Alur Kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan.....	50
C. Kinerja Kelompok Wanita Tani .....	69
D. Pendapatan Kelompok Wanita Tani .....	81
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	90
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	90
TINJAUAN PUSTAKA .....	92
LAMPIRAN .....	94
REKOMENDASI .....	101

## DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Ringkasan Variabel, Data, Satuan dan Indikator pengamatan Analisis Pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.....	39
2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, 2009 .....	41
3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, 2009.....	42
4.	Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, 2009 .....	43
5.	Identitas Responden pada Kelompok Wanita Tani Menurut Umur di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng .....	45
6.	Tingkat Pendidikan Responden Pada Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng .....	47
7.	Jumlah Tanggungan Keluarga Kelompok Wanita Tani Responden di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng ....	49
8.	Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Desa Sosialisasi pada masing-masing Desa/Kelurahan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, 2008 .....	54

9.	Usulan Kegiatan yang Ditetapkan Untuk Didanai oleh PNPM Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng .....	58
10.	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah pada Tingkat Desa/ Kelurahan se Kecamatan Tompobulu, Kab. Bantaeng .....	60
11.	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah pada PNPM Agribisnis Perdesaan di Tingkat Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, 2008.....	63
12.	Jadwal Penetapan/Pemilihan Pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan Tingkat Desa dan Kecamatan, Kecamatan Tompobulu, 2008 ....	66
13.	Keikutsertaan Responden pada Pelatihan Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, 2008 .....	72
14.	Tingkat Pemahaman Terhadap Materi Pelatihan pada Pelatihan Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, 2008 .....	73
15.	Jenis Bantuan Alat/Mesin PNPM Agribisnis Perdesaan ke Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Tompobulu .....	75
16.	Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Alat/Mesin Bantuan PNPM Agribisnis Perdesaan pada Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.....	76

17.	Tingkat Keterlibatan Anggota Dalam Proses Produksi pada Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng .....	78
18.	Tingkat Partisipasi Anggota Dalam Proses Pemasaran pada Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng .....	79
19.	Pendapatan Anggota Kelompok Wanita Tani pada Tahun 2009 dan 2010 di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng .....	85

## DAFTAR GAMBAR

GambarTeks	Halaman
1. Skema Program PNPM Agribisnis Perdesaan (PNPM-AP) .....	13
2. Skema Kerangka Pikir .....	31
3. Flowchart Pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan .....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Teks	Halaman
1.	Identitas Wanita Tani Responden di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 2011 .....	94
2.	Pendapatan Rata-Rata Wanita Tani Responden Tahun 2009 dan 2010 (Sebelum dan Setelah PNPM Agribisnis Perdesaan) .....	96
3.	Daftar Pelatihan/TOT pada Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani Pada PNPM Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2008-2009 .....	98
4.	Nilai Skoring Keaktifan Responden Pada Pelatihan Kapasitas Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, 2008- 2009.....  99	
5.	Nilai Skoring Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Materi dan Praktek pada Pelatihan Kapasitas Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, 2008-2009 .....	100

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Cara pandang yang berbeda akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana sebab-sebab kemiskinan dapat diidentifikasi, dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi.

Masyarakat miskin ada sebagai akibat dari ketimpangan pembangunan yang terjadi, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Kemiskinan yang terjadi dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural dan kesenjangan antar wilayah. Kemiskinan yang ada di masyarakat perlu diatasi dengan berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat secara terpadu. Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial mendefenisikan kemiskinan sebagai berikut :

“Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan

layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan *sosial*. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.” ([www.p3b.Bappenas.go.id](http://www.p3b.Bappenas.go.id)).

Angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2009 mencapai 32,5 juta jiwa atau 14,15% dari total penduduk yang menjadi dasar Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagian besar yaitu 63,38 persen, tinggal di desa ([www.damandiri.or.id](http://www.damandiri.or.id)).

Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin. (<http://database.deptan.go.id>).

Pembangunan perdesaan memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai

kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Pembangunan secara substantif selalu diartikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat. Karena pembangunan ditujukan untuk merubah masyarakat, maka sewajarnya masyarakatlah sebagai pemilik (owner) kegiatan pembangunan. Untuk itulah masyarakat harus terlibat sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pemanfaatannya, sehingga proses pembangunan yang dijalankan dapat memberdayakan masyarakat. Namun demikian kenyataannya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta secara fisik tanpa berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai evaluasi.

Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan. Fakta ini berangkat dari perspektif stakeholders pemerintahan bahwa berhasilnya program atau proyek pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat pada waktunya serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan orientasi seperti ini, tentunya masyarakat desa beserta stakeholder lainnya di desa yang seharusnya memiliki peranan yang besar tidak dapat mengembangkan

kemampuannya dan menjadi terbelenggu dalam berinovasi. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari implementasi program bantuan desa selama ini, justru peranan birokrat pemerintah yang amat menonjol. Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama dilaksanakan dan cukup dikenal luas di desa, namun masyarakat selalu dianggap kurang mampu, sehingga bimbingan dan arahan dari pemerintah begitu kuat pengaruhnya dan merasuk dalam masyarakat. Pada akhirnya masyarakat tergantung pada bimbingan dan arahan dari pemerintah. Bila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pembangunan di desanya.

Pengalaman selama ini menunjukkan banyak program pembangunan di desa yang digulirkan oleh Pemerintah kurang optimal melibatkan masyarakat dalam perencanaan sampai evaluasi, sehingga muncul kesenjangan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut berakibat rendahnya kepedulian masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat. Hal ini dapat terbukti dengan rendahnya tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena tanpa disadari sebenarnya peranan pemerintah masih lebih besar, meskipun tidak secara fisik, akan tetapi dalam wujud regulasi yang kurang memberikan keleluasaan bagi masyarakat secara optimal. (Anonim 1, 2009).Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Perdesaan adalah salah satu program pembangunan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Latar belakang dicanangkannya PNPM Mandiri berawal dari belum tuntasnya pemerintah menangani persoalan pengangguran di negeri ini, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang semakin lama semakin menunjukkan peningkatan, hal ini disebabkan oleh adanya pemutusan hubungan kerja oleh beberapa perusahaan sebagai akibat dari krisis ekonomi global. Dengan demikian akan berdampak langsung kepada peningkatan angka kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini telah dinilai berhasil. Diantara keberhasilan PPK adalah penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, dan keberhasilannya menumbuhkan kolektivitas dan partisipasi masyarakat. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan.

Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan mempunyai misi sebagai berikut:

- (1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
- (2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
- (3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal;
- (4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
- (5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan (PNPM AP) merupakan program yang menggunakan mekanisme kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan petani perdesaan melalui peningkatan produksi dan akses pemasaran hasil pertanian.

Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan terutama berkaitan dengan memecahkan permasalahan dan mengembangkan potensial pertanian perdesaan, mulai dari aspek perencanaan produksi, proses produksi, pasca produksi sampai dengan pemasaran hasil pertanian ([www.batukar.info](http://www.batukar.info)).

PNPM-AP merupakan salah satu Sub-Program SADI (*Small Holder Agribusiness Development Initiative*), sebuah program kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia yang menyediakan dana hibah bagi pengembangan agribisnis di wilayah perdesaan. Masing-masing desa berpartisipasi dan transparan untuk mengusulkan proposal program pengembangan agribisnis dengan menggunakan sistem kompetisi secara sehat. Usulan desa yang lolos berhak mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan kegiatan pengembangan agribisnis. Proses pendanaan PNPM-AP melekat dengan mekanisme yang selama ini dilakukan dalam program PNPM-Mandiri Perdesaan. Dana yang ada dialokasikan guna mendukung kegiatan peningkatan lapangan pekerjaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang agribisnis desa.

Dana hibah dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendukung penyediaan sarana/fasilitas umum, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif di bidang agribisnis. Dana yang disalurkan dapat digunakan untuk pengembangan media informasi agribisnis, pelatihan, kegiatan konsultatif dan asistensi teknis, advokasi kebijakan pendukung agribisnis, pengembangan jaringan pemasaran melalui pameran produk unggulan, pelelangan produk agribisnis, pengembangan demplot, pembelian alat dan bahan, perbaikan akses kepada informasi pasar.

Selama Fase-1 (2006-2009), program SADI bekerja pada 4 (empat) lokasi yaitu di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Di setiap provinsi, SADI bekerja

masing-masing di 2 (dua) kabupaten dan 3 (tiga) kecamatan ([www.batukar.info](http://www.batukar.info)).

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu lokasi pilot proyek penanggulangan kemiskinan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan (PNPM AP) di Sulawesi Selatan. Jumlah maksimum dana hibah yang diterima oleh setiap Kecamatan di lokasi pilot proyek adalah Rp. 1 Milyar. Dana tersebut dikompertisikan antar desa, dan bagi beberapa desa di setiap Kecamatan yang lolos dalam proses kompetisi dapat menggunakan dana yang disalurkan untuk pengembangan agribisnis.

Kecamatan Tompobulu sebagai salah satu kecamatan dari 3 (tiga) kecamatan lokasi pilot proyek PNPM Agribisnis Perdesaan di Kabupaten Bantaeng, dimana pada Tahun 2009 pelaksanaan program telah memasuki tahap akhir pelaksanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami menganggap perlu untuk mengadakan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan (PNPM AP) mampu memberdayakan masyarakat khususnya para wanita tani yang tergabung dalam kelompok wanita tani dilihat dari segi kinerja kelompok wanita tani dan pendapatan anggota kelompok wanita tani di Kecamatan Tompobulu.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja kelompok wanita tani setelah adanya program PNPM Agribisnis Perdesaan?
2. Bagaimana pendapatan anggota kelompok wanita tani setelah adanya program PNPM Agribisnis Perdesaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kinerja kelompok wanita tani setelah adanya program PNPM Agribisnis Perdesaan.
2. Menganalisis pendapatan anggota kelompok wanita tani setelah adanya program PNPM Agribisnis Perdesaan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah/Stakeholder dalam pengambilan kebijakan program selanjutnya, khususnya kebijakan program yang menyangkut pemberdayaan masyarakat perdesaan guna peningkatan taraf hidup masyarakat/petani miskin perdesaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Gambaran Umum Tentang PNPM Agribisnis Perdesaan**

*Smallholder Agribusiness Development Initiative* (SADI) atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan (PNPM AP) merupakan program percepatan penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan petani perdesaan melalui peningkatan produksi dan akses pemasaran hasil pertanian menggunakan mekanisme kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MP).

Kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan terutama berkaitan dengan bagaimana memecahkan permasalahan dan mengembangkan potensi pertanian perdesaan, mulai aspek perencanaan produksi, proses produksi, pasca produksi sampai dengan pemasaran hasil pertanian. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif dan berbasis pada kelompok tani atau kelembagaan yang telah ada di masyarakat, sehingga PNPM Agribisnis Perdesaan diharapkan mampu meningkatkan mutu usulan kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif khususnya dalam bidang pengembangan potensi Pertanian Perdesaan berikut upaya mengatasi masalah yang dihadapi (<http://nusataniterpadu.wordpress.com>).

PNPM Agribisnis Perdesaan mendukung perluasan model PNPM Mandiri Perdesaan terutama bagi kegiatan pengembangan ekonomi

produksi pada tingkat rumah tangga. Masyarakat perdesaan dibantu untuk mengidentifikasi kendala-kendala utama dan peluang terhadap produksi dan akses pasar hasil pertanian. Dalam kegiatan ini masyarakat petani di perdesaan akan mendapatkan bantuan teknis dari tenaga ahli sesuai dengan usulan dari masyarakat melalui mekanisme kompetisi ([www.batukar.info](http://www.batukar.info)).

Tujuan Umum PNPM Agribisnis Perdesaan adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan cara meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan kapasitas kelompok petani miskin, produktifitas serta akses pemasaran hasil pertanian perdesaan (<http://nusataniterpadu.wordpress.com>).

Tujuan khusus PNPM Agribisnis Perdesaan adalah:

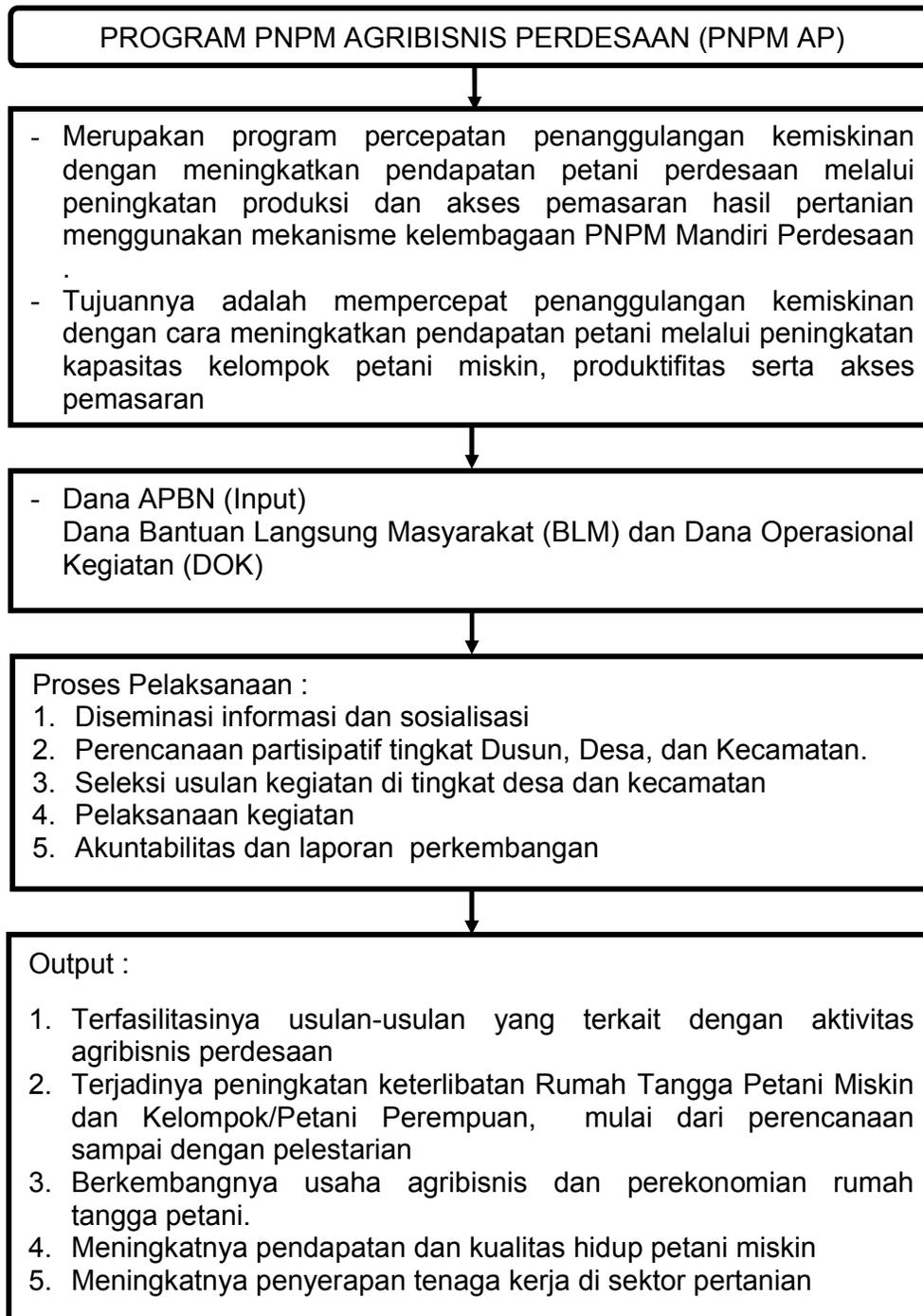
1. Meningkatkan kemampuan petani miskin dalam memenuhi ketersediaan sarana produksi pertanian.
2. Mendorong peningkatan jumlah dan mutu produksi pertanian petani miskin.
3. Meningkatkan pendapatan petani miskin dengan mengurangi hambatan pasca panen sampai dengan pemasaran hasil pertanian.
4. Meningkatkan kinerja kelembagaan masyarakat tani melalui peningkatan kapasitas organisasi kerja kelompok tani.
5. Mendorong kemitraan kelompok tani dengan sektor perbankan/ lembaga keuangan dan swasta.

Sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan yaitu : 1) Petani miskin; 2) Kelompok tani kecil (*smallholder agribusiness*); 3) Kelembagaan masyarakat tani dan pemerintahan lokal.

Lokasi sasaran PNPM Agribisnis Perdesaan yaitu kecamatan-kecamatan terpilih berdasarkan potensi pengembangan dan dukungan Pemerintah Daerah. Lokasi pilot proyek PNPM Agribisnis Perdesaan terdapat di Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Lokasi Program PNPM Agribisnis Perdesaan di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Bantaeng berada di 3 (tiga) Kecamatan yaitu : Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Bissappu dan Kecamatan Gantarangkeke. Program PNPM Agribisnis Perdesaan berlangsung selama 2 (dua) Tahun Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2008 s/d Tahun Anggaran 2009.

Penjelasan lebih ringkas mengenai Program PNPM Agribisnis Perdesaan secara skematis dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Skema Program PNPM Agribisnis Perdesaan (PNPM-AP)

PNPM Agribisnis Perdesaan merupakan program pemerintah dengan dana yang berasal dari grant pemerintah Australia, Nomor TF057097. PNPM Agribisnis Perdesaan menyediakan dana langsung dari Pusat dan disalurkan ke rekening kolektif desa yang berada di kecamatan lokasi pilot program. Masyarakat desa yang tergabung dalam kelompok tani dapat mengelola dana tersebut sebagai stimulan dalam upaya pembangunan dan pengembangan kegiatan agribisnis yang berkelanjutan (<http://nusataniterpadu.wordpress.com>).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan merupakan program pemerintah dengan dana yang berasal dari Grant pemerintah Australia tersebut, dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan dua komponen lain dalam pilot proyek SADI, yaitu IFC (*International Finance Corporation*) yang memberikan dukungan dalam hal akses terhadap pasar dan keuangan, dan ACIAR (*Australian Center for International Agricultural Research*) mendukung dengan mensuplai hasil-hasil penelitian adaptive untuk memecahkan masalah yang dihadapi petani (<http://nusataniterpadu.wordpress.com>).

Besaran Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2008 di Kecamatan Tompobulu yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000 sedangkan pada Tahun Anggaran 2009 berupa Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebesar Rp. 63.900.000,-. Peruntukan dana tersebut selain dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat berupa

modal usaha dan alat/mesin, juga diperuntukkan untuk membiayai semua bentuk kegiatan sebagai Dana Operasional Kegiatan. Dana Operasional Kegiatan (DOK) ini mencakup biaya-biaya pertemuan, pelatihan kelompok, dan honor pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan tingkat kecamatan dan desa.

Untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pengelolaan program, maka PNPM Agribisnis Perdesaan juga mengembangkan upaya-upaya pengamanan (*safeguarding*) terhadap program-program yang dikembangkan di bawah koordinasinya. Salah satu komponen *safeguarding* yang dikembangkan adalah Pemantauan dan Evaluasi yang terpadu dan melibatkan multi pihak, baik pelaksana program maupun pihak-pihak independen. Pelaksana program dilibatkan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap program yang dikelolanya, sedangkan pihak-pihak independen yang termasuk pula masyarakat luas diharapkan keterlibatannya sebagai bentuk kepedulian dan rasa kepemilikannya terhadap program yang dilaksanakan di lingkungannya.

Pemantauan dan evaluasi yang dikembangkan oleh PNPM Agribisnis Perdesaan menjadi satu kesatuan dengan mekanisme Pengelolaan Pengaduan dan Masalah (PPM) dan Management Information System (MIS) PNPM Mandiri. Dari salah satu instrumen *safeguarding* yaitu pemantauan dan evaluasi tersebut diharapkan dapat

diperoleh gambaran pelaksanaan program secara utuh, permasalahan-permasalahan yang timbul, masukan-masukan dari berbagai pihak, dan tindak lanjut yang diperlukan segera sehingga penyesuaian dan langkah-langkah strategis yang diperlukan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat terhadap program. Penerbitan melalui media, diharapkan dapat melibatkan berbagai pihak untuk terlibat di dalam pengawasan program serta pihak-pihak yang dapat menjadi mitra dalam menindaklanjuti permasalahan yang ada (<http://nusataniterpadu.wordpress.com>).

Beberapa bentuk pemantauan yang diterapkan oleh PNPM Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Tompobulu yaitu:

1). Pemantauan Partisipatif Oleh Masyarakat

Pemantauan oleh Masyarakat melibatkan kelompok dan warga masyarakat secara luas dalam pengawasan dan pemantauan kegiatan/program. Bentuk pemantauan masyarakat terhadap setiap proses pelaksanaan kegiatan program baik fisik maupun non fisik, yaitu dalam hal masyarakat dapat membuat laporan atau pengaduan kepada Pemerintah setempat atau ke Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantaeng sebagai satker pengelola dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan.

2). Pemantauan Oleh Pemerintah

Dana pengelolaan PNPM Agribisnis Perdesaan merupakan dana publik, sehingga Pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan

apakah pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai prinsip dan prosedur yang berlaku dan telah dimanfaatkan dengan baik. Pemantauan oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk peninjauan secara langsung ke lokasi pelaksanaan program maupun dalam bentuk permintaan laporan hasil perkembangan atau pelaksanaan kegiatan kepada semua pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan tingkat desa dan kecamatan hingga kabupaten.

3). Pemantauan Oleh Konsultan

Pemantauan juga dilakukan oleh jajaran konsultan dan fasilitator PNPM Agribisnis Perdesaan. Konsultan di Tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kader di Tingkat Desa berbagi tanggungjawab untuk memantau kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan.

Pemantauan oleh konsultan dilakukan baik secara langsung terjun ke lapangan maupun dalam bentuk penerimaan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan program yang dibuat oleh pelaku PNPM Tingkat Kabupaten.

4). Pemantauan Oleh Organisasi Non-Pemerintah

Organisasi Non-Pemerintah seperti LSM, Jurnalis, Perguruan Tinggi juga dapat terlibat dalam melakukan pemantauan independen terhadap pengelolaan program PNPM Agribisnis Perdesaan, baik dalam hal penyaluran dananya maupun dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Bentuk pemantauan didasarkan oleh adanya

laporan penyelewengan penggunaan dana selama pelaksanaan program. Laporan penyelewengan tersebut biasanya didapatkan dari masyarakat dimana lokasi PNPM berada.

## **B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber power. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya *power dis powerment*, yakni peniadaan power pada sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki power (Kartasmita, 1996 *dalam* <http://www.damandiri.or.id>).

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) secara konseptual berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya, (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan (Suharto, 2009).

Pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.

Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertamanya haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah (Kartasasmita, 1996 dalam <http://www.damandiri.or.id>).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*". Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut :

- (1) Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi;
- (2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran;
- (3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi;
- (4) Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Priyono dan Pranarka, 1996 *dalam* [www.damandiri.or.id](http://www.damandiri.or.id)).

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Kopenhagen Tahun 1992 juga telah memuatnya dalam berbagai kesepakatannya. Namun, upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan keadilan. Mereka yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi dalam

pembangunan tidak akan merasa tentram dengan konsep pemberdayaan ini. Lebih lanjut, disadari pula adanya berbagai bias terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan ([www.litbang.deptan.go.id](http://www.litbang.deptan.go.id)).

Maksud pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya (tujuan umum). Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan, potensinya serta peluang. Tahap ini sering dikenal dengan “kajian keadaan pedesaan partisipatif” atau sering dikenal dengan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). PRA adalah suatu pendekatan yang memanfaatkan macam-macam teknik visualisasi (misalnya gambar, tabel dan bentuk/diagram) untuk proses analisa keadaan. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Tahapan dalam proses kajian meliputi: (1) persiapan desa dan masyarakat (menentukan teknis pertemuan), (2) persiapan dalam tim (kesepakatan teknik PRA, alat dan bahan, pembagian peran dan tanggungjawab), (3) pelaksanaan kajian keadaan: kegiatan PRA dan (4) pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.

b. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian setelah teridentifikasi segala potensi dan permasalahan masyarakat, langkah selanjutnya adalah menfokuskan kegiatan pada masyarakat yang benar-benar tertarik untuk melakukan kegiatan bersama. Pembentukan kelompok berdasar kemauan masyarakat dan dapat menggunakan kelompok-kelompok yang sudah ada sebelumnya dilengkapi dengan kepengurusan dan aturan. Kelompok dengan difasiltasi oleh fasilitator menyusun rencana kelompok berupa rencana kegiatan yang kongkrit dan realistis. Tahapan penyusunan dan pelaksanaan rencana kelompok :

- Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah hasil PRA lebih rinci
- Identifikasi alternatif pemecahan masalah terbaik
- Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah
- Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya

c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok

Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang kongkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

- d. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus (Monitoring dan Evaluasi Partisipatif/M & EP). Monitoring dan Evaluasi Partisipatif dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar proses Pemberdayaan Masyarakat berjalan dengan tujuannya. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, baik *prosesnya* (pelaksanaan) maupun *hasil* dan *dampaknya* agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan ([www.damandiri.or.id](http://www.damandiri.or.id))

### **C. Kinerja Kelompok Wanita Tani**

Prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pengembangan kelembagaan di pedesaan agar dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan adalah : a). Prinsip otonomi (spesifik lokal); b). Prinsip pemberdayaan petani dan c). Prinsip kemandirian lokal (<http://www.info.stppmedan.ac.id>).

Menurut Dimiyati, 2007 *dalam* <http://www.info.stppmedan.ac.id>, permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan kelembagaan petani di Indonesia adalah :

1. Masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran.
2. Belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. Aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (on farm).

3. Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya.

Keberadaan kelompok tani akan memberikan suatu keuntungan optimal apabila semua komponen yang terlibat ikut berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok tani, baik itu menyangkut kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan usahatani maupun kegiatan yang berhubungan dengan peran kelompok tani itu sendiri (Pambudy, 2000).

Penguatan kapasitas terhadap kelompok wanita tani adalah melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan langsung kepada kelompok. Pelatihan dan pembinaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kelompok wanita tani dalam mengelola usahanya, bagaimana membangun kerjasama antar anggota dalam kelompok, dan kemampuan menjalin kerjasama dengan pihak luar.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Banyak proyek/program pemerintah yang sudah dilaksanakan untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan. Proyek/program tersebut dilaksanakan masing-masing oleh departemen

maupun antar departemen. Pada umumnya proyek-proyek yang digulirkan masih pada generasi pemberian bantuan fisik kepada masyarakat. Kenyataannya, ketika proyek/program berakhir maka keluaran proyek/program tersebut sudah tidak berfungsi atau bahkan hilang. Beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan proyek tersebut antara lain, yaitu: (1) ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan (2) paket proyek tidak dilengkapi dengan ketrampilan yang mendukung (3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana (4) tidak ada kelembagaan di tingkat masyarakat yang melanjutkan program. Belajar dari berbagai kegagalan tersebut, generasi selanjutnya program dikelola dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, hasil program lebih lama dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan berkembang memberikan dampak positif.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan (PNPM - AP) adalah sebuah pilot proyek pemberdayaan masyarakat, sebagai bentuk perluasan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) yang diharapkan mampu bersinergi dengan PNPM - MP dalam rangka menanggulangi kemiskinan di wilayah perdesaan melalui kegiatan-kegiatan yang berbasis perencanaan partisipatif dalam bidang agribisnis. Dalam pelaksanaannya, PNPM Agribisnis Perdesaan mengikuti alur / tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan terutama pada proses perencanaan kegiatan, sehingga usulan kegiatan masyarakat benar-benar digagas dari masyarakat, dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat, dan

dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sasaran PNPM Agribisnis Perdesaan adalah pemberdayaan masyarakat/petani dengan tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan petani miskin melalui partisipasi aktif petani/keompok tani dalam program mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan; peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan (pelatihan); pengembangan usaha agribisnis (penerapan teknologi baru), yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Adapun proses pelaksanaan program meliputi diseminasi informasi dan sosialisasi program, perencanaan partisipatif tingkat dusun, desa dan kecamatan (Pemilihan kader pemberdayaan agribisnis desa), seleksi usulan kegiatan tingkat desa dan kecamatan, pelaksanaan kegiatan, akuntabilitas dan laporan perkembangan pelaksanaan.

Secara singkat proses pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan (PNPM-AP) di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut :

1. Diseminasi informasi dan sosialisasi program.

- Input : Pelaksanaan Musyawarah Desa Sosialisasi yang dihadiri oleh Masyarakat, Pemerintah Kecamatan dan Pelaku PNPM.
- Output : Terlaksananya Musyawarah Desa.
- Outcome : Musyawarah Desa dihadiri oleh masyarakat dan Pemerintah setempat serta pelaku PNPM.

- Dampak : Tersebar nya informasi tentang PNPM Agribisnis pedesaan kepada hampir seluruh masyarakat desa.
2. Perencanaan partisipatif tingkat desa dan kecamatan (Pemilihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Kader Agribisnis Desa (KAD) dan Tim Verifikasi).
- Input : Pemilihan TPK, KAD dan Tim Verifikasi yang dihadiri oleh Masyarakat, Pemerintah dan Fasilitator Kabupaten.
  - Output : Terlaksananya pemilihan kader atau pelaku PNPM tingkat desa dan kecamatan yang dipilih langsung oleh masyarakat.
  - Outcome : Terpilihnya TPK, KAD, dan Tim Verifikasi di masing-masing desa.
  - Dampak : Pelaksanaan program dapat terlaksana dengan baik karena didampingi dan diawasi oleh kader atau pelaku PNPM terpilih.
3. Seleksi usulan kegiatan tingkat desa dan kecamatan
- Input : Masyarakat, Pelaku PNPM, Pemerintah setempat .
  - Output : Terdapat beberapa usulan kegiatan yang merupakan hasil Musyawarah Desa dari masing-masing desa di Kecamatan Tompobulu.

- Outcome : Diperoleh 6 jenis usulan kegiatan PNPM AP yang merupakan usulan dari 9 desa/kelurahan di Kecamatan Tompobulu.
- Dampak : Masyarakat desa mampu menghasilkan usulan kegiatan yang dilakukan secara musyawarah.

#### 4. Pelaksanaan Kegiatan

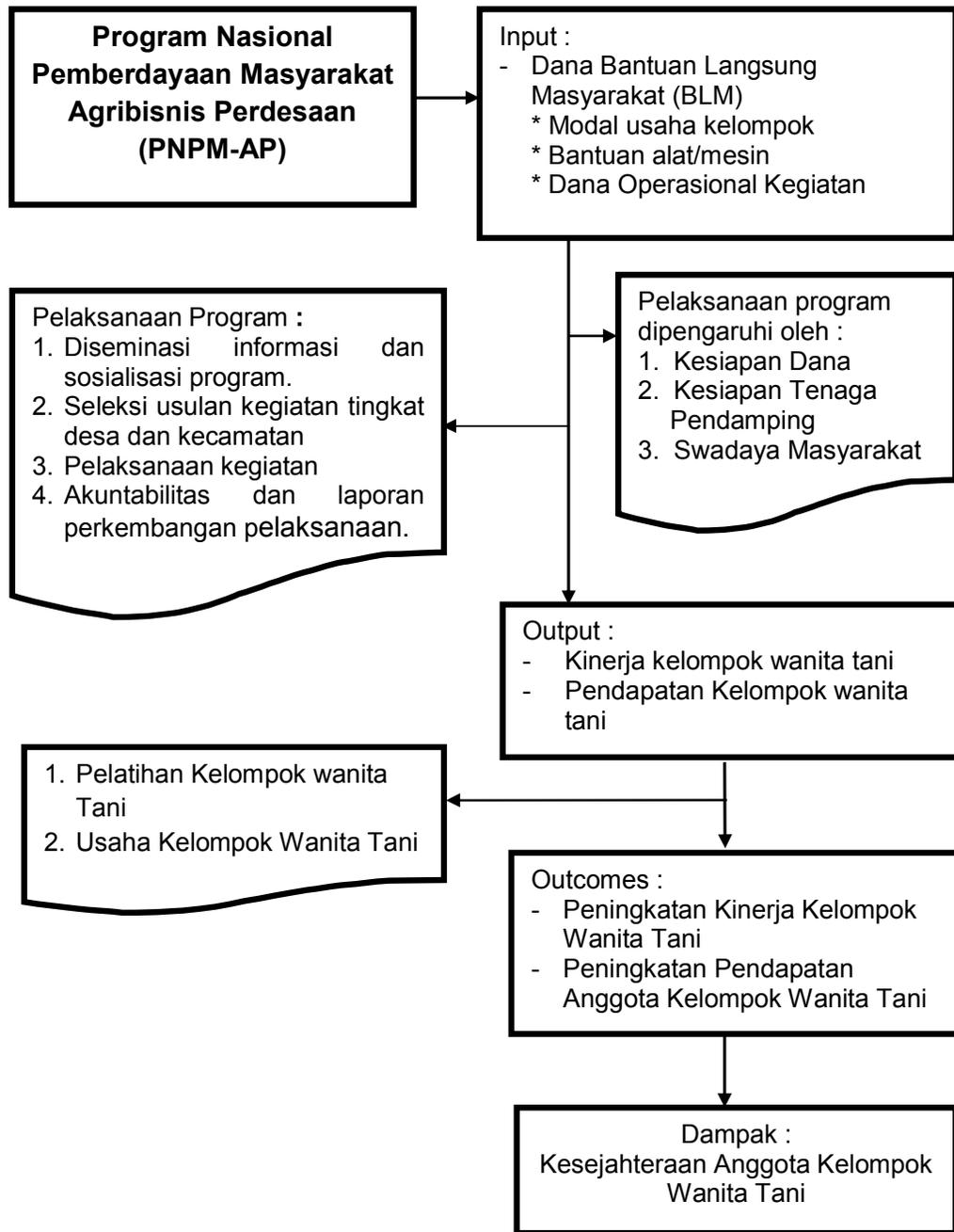
- Input : Masyarakat, Pelaku PNPM, Pemerintah setempat
- Output : Terlaksananya semua usulan kegiatan hasil seleksi Musyawarah Antar Desa II atau Musyawarah Prioritas Usulan/Perangkingan.
- Outcome : Terlaksananya 7 usulan kegiatan di Kecamatan Tompobulu.
- Dampak : Masyarakat luas merasakan hasil dari pelaksanaan pembangunan PNPM Agribisnis Perdesaan

#### 5. Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan

- Input : Masyarakat, TPK dan Fasilitator Kecamatan
- Output : Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan
- Outcome : Diperoleh Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan secara rutin dari para pelaku PNPM.
- Dampak : Pelaksanaan program berlangsung sesuai yang diharapkan.

Setelah pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng selesai dilaksanakan yang kini telah memasuki Phase Out (telah berakhir pelaksanaannya), apakah hasil dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan mampu memberikan dampak yang lebih baik terhadap kinerja dan pendapatan kelompok wanita tani dibandingkan sebelum adanya program ini, hal ini yang akan menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini.

Adapun kerangka pikir penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan (PNPM-AP) terhadap kinerja dan pendapatan kelompok wanita tani di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng lebih lanjut dapat ditunjukkan secara skematis pada gambar 2 berikut ini :



**Gambar 2. Skema Kerangka Pikir**

## **E. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan maupun tujuan penelitian tentang analisis pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan terhadap kinerja dan pendapatan kelompok wanita tani, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Diduga kinerja kelompok wanita tani membaik setelah melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan.
2. Diduga ada peningkatan pendapatan anggota kelompok wanita tani melalui kegiatan usaha kelompok setelah adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan..